

Bab X

PENDIDIKAN DAN EKONOMI

A. Kontribusi Pendidikan terhadap Kesuksesan Ekonomi

Setiap masyarakat di seluruh dunia ini senantiasa menghendaki kesejahteraan. Khusus untuk kesejahteraan fisik, mereka secara praktis bersama mengembangkan sistem yang mengatur bagaimana seluruh anggotanya berproses memperoleh kesuksesan, mengupayakan distribusi pemuas kesejahteraan serta menjamin bagaimana alokasi wahana kesuksesan tersebut dapat di-anugerahkan kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya. Dalam kaitan tersebut, terminologi sosiologi memfokuskan studi tentang kesejahteraan dan sistem kesejahteraan fisik tersebut dalam suatu wadah subkajian bernama lembaga sosial ekonomi.

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Di sini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik.

Dalam konteks tersebut, keniscayaan aktivitas pendidikan senantiasa dibingkai dari realitas sosial ekonomi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat deterministik menjadi karakter hubungan kedua pranata sosial tersebut. Asumsi-asumsi yang berkembang selalu menekankan pengaruh persepsi umum mengenai simbol-simbol yang terbentuk dari pranata sosial ekonomi. Keyakinan umum bahwa seseorang yang memiliki bekal pendidikan formal akan cenderung menuai sukses ekonomi merupakan suatu contoh pengaruh pranata pendidikan terhadap aktivitas ekonomi para anggota suatu masyarakat.

Robert K Merton (dalam Miffen, 1986) menyatakan bahwa, setiap lembaga sosial tidak sekadar memelihara sebuah tujuan dan fungsi yang manifes, yakni sebuah fungsi yang mencerminkan kegunaan dari terbentuknya sebuah pranata. Namun karena

realitas sosial semenjak ilmu pengetahuan telah menguasai iklim kehidupan manusia bukanlah sebuah *kredo monolog* yang tugasnya meminimalisasi perubahan-perubahan. Justru realitas itu kini lebih bersifat acak, dinamis, dan membias keseluruhan segi maka fungsi latenlah yang mengambil alih pola gerak maupun hubungan lintas lembaga sosial.

Munculnya asumsi sosial bahwa pendidikan mempengaruhi kesuksesan ekonomi seseorang bukanlah suatu keyakinan spontan yang tidak berdasar. Berangkat dari sebuah trend sosial masyarakat di Indonesia, misalnya pada awal dekade berkuasanya Orde Baru, sebagian besar lini pekerjaan membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan formal. Hampir mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal mampu terserap di lahan-lahan pekerjaan. Situasi tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga terdidik untuk mengoperasikan *skill* dan keahliannya dalam rangka industrialisasi dan modernisasi pembangunan negara.

Selain itu, keyakinan umum tersebut juga bukanlah hal yang baru. Puluhan tahun yang lalu ketika politik etis diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda berhasil membentuk pola pikir masyarakat kita tentang pendidikan dengan kesuksesan ekonomi. Para pribumi (meskipun hanyalah bangsawan dan golongan priyayi) yang memiliki ijazah dari sekolah-sekolah bentukan kolonial mendapat kesempatan untuk ditempatkan pada instansi-instansi pemerintah kolonial. Meskipun posisi mereka hanya sebagai pegawai rendahan, namun keberadaan mereka yang telah mendominasi lembaga birokrasi kolonial berhasil menggeser persepsi masyarakat. Lembaga pendidikan tepatnya sekolah dianggap sebagai tangga strategis untuk meraih kemapanan hidup tanpa harus melalui usaha-usaha ekonomi lain yang tampaknya lebih lambat dan beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan.

Argumen lain yang melandasi kepercayaan umum bahwa melalui sekolah atau pendidikan formal para individu dapat mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan relatif cepat lantaran dalam lembaga sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para pesertanya dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era modern. Selain itu, sebuah ekspektasi sosial juga menggejala pada salah satu asumsi bahwa melalui penempaan *skill* secara

berkesinambungan dalam sebuah organisasi yang mapan para lulusan lembaganya akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan kepribadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi ekonomis dalam setiap kondisi maupun situasi. Sehingga dari otak dan tangan-tangan merekalah akan memunculkan lahan-lahan penghidupan baru yang mampu menjamin kesejahteraan manusia.

Di antara berbagai persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat, merebaknya persepsi lain juga tidak bisa dipungkiri seputar problema besar yang tengah kita hadapi bersama yakni persoalan krisis Sumber Daya Manusia yang cukup akut. Berdasarkan sebuah data bahwa jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (*open unemployment*). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Dari fakta statistik tersebut dapat menjadi bukti lemahnya sistem dan orientasi lembaga pendidikan kita untuk memproduksi tenaga kerja yang siap kerja.

Secara lebih luas, besarnya angka pengangguran terdidik yang memadati setiap sudut wilayah di Indonesia (terutama di kota) sudah cukup membuktikan bahwa proses aktivitas pendidikan nasional tengah mengalami kegagalan. Sebagai salah satu institusi masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya manusia-manusia yang mampu menjadi katalisator kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan telah berbalik arah membebani masyarakat kita yang memang sudah carut marut diterpa badai krisis multidimensi yang berkepanjangan.

Kiranya perlu kita amati lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena masyarakat kita. Studi sosiologi pendidikan tidak berusaha memberikan solusi yang bernuansa etis, akan tetapi kajian teoretisnya berusaha memberikan gambaran objektif tentang seluruh komponen yang mempengaruhi konstruksi hubungan antara pranata pendidikan dan pranata ekonomi.

B. Pendidikan dan Ekonomi pada Zaman Modern

Pada umumnya, kita melihat bahwa masyarakat kita berbeda dengan kehidupan masa lalunya. Secara tegas perbedaan demi-

kian oleh Schoorl (1974) disebut sebagai efek dari modernisasi. Schoorl menegaskan bahwa modernisasi merupakan upaya pergantian dari penggunaan teknik industri yang bersifat tradisional menjadi cara-cara yang cenderung modern. Sementara kalangan sosiolog lebih berfokus melihat proses diferensiasi sosial yang cenderung menggejala pada kondisi sosial masyarakat tersebut.

Dalam segi kelembagaan, proses diferensiasi sosial juga tidak bisa ditolak kehadirannya, termasuk lembaga pendidikan ekonomi dan lembaga pendidikan di dalamnya. Perbedaan keterkaitan dua lembaga tersebut cukup mencolok apabila kita bandingkan aplikasinya pada masyarakat tradisional. Pada masyarakat demikian seluruh pranata-pranata sosial cenderung bersifat lebur dan belum terpilah-pilah pada orientasi spesifik. Pranata keluarga memiliki peranan yang cukup dominan dalam melayani seluruh kebutuhan para anggota baik itu pendidikan, kesehatan, religi dan peribadatan, kelangsungan ekonominya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, interaksi antara satuan keluarga bukanlah hal yang bersifat fundamental. Sementara kesatuan masyarakat diikat oleh satu alur kekuatan suku, klen, keluarga luas atau sejenisnya yang pada hakikatnya merupakan representasi dari peran pranata keluarga. Itulah sebabnya arus dinamika pada masyarakat tradisional cenderung bersifat rutin.

Sering kita temui pada masyarakat desa pola hubungan konstruktif antara pendidikan dan ekonomi. Proses pembekalan keahlian bercocok tanam diterapkan langsung dalam lahan-lahan persawahan dari proses menanam benih hingga panen. Anak-anak muda sejak dini sudah dibiasakan ikut melakukan aktivitas serupa yang dilakukan oleh orang tua dalam mengelola lahan pertanian dari belajar mencari pakan ternak, mencangkul, memilih bibit-bibit tanaman atau membajak sawah. Hal demikian berlaku pula pada masyarakat beternak dan berburu. Proses pembelajaran demikian selain berhubungan langsung dengan fungsi pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dari koridor ekonominya. Kelangsungan ekonomi masyarakat sederhana sudah cukup terpenuhi apabila dari mata pencaharian yang mentradisi sudah mampu menjamin kelangsungan hidup. Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dengan kondisi lingkungan fisik melahirkan iklim pemikiran yang relatif sederhana dari segi kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penguasaan keahlian melanjutkan jenis-jenis mata

pencarian oleh pendahulunya baik itu bercocok tanam, berburu, beternak, atau aplikasi kerajinan-kerajinan tradisional memiliki fungsi ekonomi yang cukup kuat dalam mempertahankan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Dari sini kita bisa melihat hubungan fungsional antara pendidikan sebagai sarana pembekalan kemampuan ekonomi bagi generasi penerus pada masyarakat yang sederhana.

Hal yang terjadi pada masyarakat yang sederhana sangat jauh berbeda dengan pola-pola kegiatan bagi masyarakat yang sudah kompleks. Eksistensi masyarakat kompleks merupakan hasil bentukan pergumulan antara sejarah, ruang maupun waktu yang mampu merentangkan proses evolusi kebudayaan manusia. Di dalamnya terdapat gejala modernisasi sebagai salah satu komponen yang menopang perubahan-perubahan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Faqih (2001) bahwa modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner (perubahan dari tradisi ke modern), sistematis, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi (*convergency*) dan bersifat progresif.

Modernisasi sebagai efek domino dari perubahan konstruksi pikiran tentang dunia dari yang bersifat tradisional mengarah pada pemupukan peranan akal dan pikiran sebagai aktor dominan dalam segala kegiatan. Perkembangan ini telah dirintis oleh penemuan-penemuan teoretis para ilmuwan kritis. Dari penemuan itu mereka telah mendorong kelahiran ilmu-ilmu murni yang memiliki daya generalisasi kuat untuk menangkap dan mengendalikan gejala-gejala alam. Ilmu-ilmu baru tersebut ternyata juga mendorong terciptanya teknik-teknik baru. Teknik produksi yang berpengaruh langsung pada kemajuan produksi barang-barang memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Di Inggris revolusi industri telah memicu menjamurnya pabrik-pabrik produksi barang kebutuhan. Oleh sebab itu harga tenaga kerja manusia menjadi sedemikian rendah bila dibandingkan dengan kapasitas kekuatan mesin yang mampu mencetak ratusan produk.

Pengaruh paling signifikan yang melatarbelakangi proses modernisasi selain revolusi teknik-teknik fisik adalah revolusi cara pandang dan berkebudayaan. Banyak tokoh-tokoh sosiologi klasik

memperhatikan lompatan-lompatan perubahan pikiran manusia melalui modernisasi. Baik itu Emile Durkheim, Auguste Comte, Max Weber, Talcott Parson serta beberapa tokoh lain. Secara terfokus mereka menempatkan kiprah rasio sebagai instrumen yang paling urgen mendongkrak kemajuan tata kehidupan manusia.

Dalam segi kelembagaannya proses perubahan sosial demikian menyebar ke seluruh sendi pranata masyarakat. Sehingga mendorong anonimitas kerja pada masing-masing lembaga. Produksi barang secara massal berpengaruh langsung pada lembaga ekonomi sehingga melahirkan pembaharuan teknik-teknik pengelolaan, distribusi serta alokasi-alokasi sumber daya ekonomi yang semakin rumit. Proses pembekalan kemampuan kerja berkembang menjadi tumpukan-tumpukan tuntutan keahlian yang semakin mendesak pula demi menjamin berjalannya roda industrialisasi masyarakat modern. Kenyataan itu memungkinkan berkembangnya lembaga pendidikan secara lebih atraktif untuk memainkan peranan. Di sinilah mulai muncul peta baru hubungan lembaga pendidikan dengan pranata ekonomi pada zaman industrial.

Semenjak revolusi industri proses kemajuan kehidupan telah menyebar ke seluruh segi, baik itu secara fisik maupun nonfisik. Khusus bagi negara-negara Eropa Barat, perubahan sosial tersebut menciptakan tatanan kehidupan fisik yang memadai dengan beragam fasilitas hidup yang serba lengkap, mewah bahkan terus mengalami perkembangan inovasi-inovasi. Kondisi demikian melahirkan tuntutan tipologi manusia tertentu yang mampu bertahan, berkembang dan memberikan kontribusi untuk memutar kelanjutan modernisasi. Penguasaan *skill* yang cukup rumit seakan-akan selaras dengan bentuk masyarakat baru yang bertumpu pada kelangsungan ekonomi industrial. Di sinilah letak perbedaan struktural hubungan pendidikan dengan ekonomi antara masyarakat sederhana dengan masyarakat kompleks.

Tampaknya kecenderungan modernisasi juga berpengaruh kuat pada kelangsungan hidup masyarakat Asia-Afrika yang pada periode tersebut tengah dilanda penindasan jangka panjang. Sebagian besar daerah yang subur telah menjadi wilayah jajahan para imperialis dari Eropa Barat. Namun semenjak pasca Perang Dunia I banyak daerah koloni-koloni berhasil memerdekakan diri. Menurut Lewis, 1969 (dalam Schoorl, 1976) bahwa negara-negara

sedang berkembang melakukan pencangkakan organisasi-organisasi yang kompleks serta diferensiasi besar secara langsung dari negara-negara maju.

Upaya pendirian negara sebagai sebuah entitas politis yang memiliki wewenang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat pada negara-negara berkembang merupakan wujud dari pencangkakan organisasi (adopsi bentuk dan pola lembaga dari negara maju). Di sini bisa kita amati implikasi dari proses modernisasi dalam konteks politik. Menurut Schoorl (1976) pengertian modernisasi politik menunjuk proses diferensiasi dari struktur politik, sekularisasi kebudayaan politik dan partisipasi yang semakin besar dalam proses politik oleh kelompok-kelompok di seluruh masyarakat, sehingga kapasitasnya bertambah semakin besar.

Pengertian tersebut memberikan makna bahwa proses orientasi masyarakat dunia ketiga yang tadinya terbatas pada dinamika-dinamika lokal dan primordialis, kini telah mengalami transformasi kelembagaan yang diatur secara langsung oleh sebuah otoritas organ tunggal bernama *nation state*.

Dengan demikian infrastruktur dan sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana dikutip Anshori (2000) hal di atas didukung secara tegas oleh pemerintah baik dalam Repelita I maupun Repelita II. Dalam buku Repelita I antara lain dikatakan, sebagai berikut.

“Pendidikan harus mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan serta kemungkinan-kemungkinan perkembangan ekonomi dan sosial, sehingga dapat memberi bekal hidup para murid-murid dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan landasan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan prioritasnya pada pertanian, industri yang

menyokong pertanian, industri kecil dan ringan, industri pertambangan, prasarana serta pariwisata maka pengarahannya harus disesuaikan dengan prioritas-prioritas tersebut. Hal ini terutama diperlukan pada tingkat-tingkat pendidikan yang akan menghasilkan lulusan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang”

Dalam buku Repelita II, apa yang ditulis dalam buku Repelita I dipertegas kembali dengan mengatakan bahwa landasan dan arah kebijakan dasar dari pembangunan di bidang pendidikan antara lain, adalah:

1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.
2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas landasan falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dan menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Beberapa kutipan di atas secara jelas untuk menunjukkan peranan pendidikan dalam rangka menopang politik ekonomi nasional yang memfokuskan diri pada upaya keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbasiskan pada orientasi aktivitas industrial.

Secara paradigmatik keterkaitan antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan praktik pendidikan tersebut cenderung melahirkan karakter pendidikan yang berbasiskan aliran liberalis-kapitalis. Hal ini pun sejalan dengan ungkapan beberapa pakar pendidikan liberal di antaranya B.F. Skinner. Bagi Skinner (dalam O'neil, 2001), pemikiran yang benar-benar efektif dalam pola

ilmiah memerlukan masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencarian kebenaran ilmiah dan diperintah oleh mereka yang mampu menemukan dan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah pada pengaturan perilaku manusia. Oleh karena itu, dalam batasan sosialnya, Skinner menolak demokrasi organisasi politik, karena ia percaya bahwa keputusan-keputusan sosial yang penting artinya harus dibuat oleh mereka yang telah terlatih secara ilmiah untuk membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dan tercerahkan (O'neil, 2001: 422). Di sini sangat jelas nuansa *teknokrasi ilmiah* dalam operasi pemerintahan, di mana dengan tenaga-tenaga manusia yang berpengetahuan ilmiah ditempatkan sebagai agen perencanaan atau generalis yang akan mengemudikan orientasi dan arahan kehidupan masyarakat.

Sementara proses pertemuan titik liberalis dengan kapitalis dapat kita lihat melalui ungkapan tokoh sejarawan pendidikan terkemuka R. Freeman Butts, 1978 dalam bukunya *Public Education in The United State: from Revolution to Reform* (O'neil, 2001: 432). Menurut Butts sekitar dua dekade pertama abad ke-20 di Amerika Serikat muncul dua kubu dalam aliran progresif yang secara fundamental bertentangan pandangan, yakni pihak yang lebih menekankan pada *bisnis* (pandangan ini lebih berbicara banyak tentang 'kontrol sosial' serta 'efisiensi sosial'). Sementara yang kedua adalah "kaum progresif yang berorientasi pada kesejahteraan", yang secara terfokus lebih memprioritaskan "layanan sosial".

Perkembangan selanjutnya semakin menunjukkan titik perpecahan yang amat krusial. Hal itu dapat diamati semenjak Pasca Perang Dunia I, di mana para penganut *progresifisme* di bidang politik, ekonomi serta pendidikan cenderung kehilangan jati diri, dan istilah 'progresif' kebanyakan diambil alih oleh kelompok baru yang pada intinya adalah kumpulan 'pembaharu' (reformis) kelas menengah yang memusatkan perhatian penting pada perkembangan individual yang dipisahkan dari pembaharuan sosial (ketika *Progressive Education Association* didirikan dengan pembangunan individual dan sedikit sekali menyinggung persoalan pembaharuan sosial (O'neil, 2001: 447).

Gerakan-gerakan pendidikan kontemporer yang mengacu pada sasaran behaviorial, kurikulum berbasis kompetensi dan sejenisnya, adalah bentuk gerakan pada pendidik atau psikolog

pendidikan yang kecondongan orientasinya mengarah pada penerapan psikologi ilmiah atas perilaku siswa di ruang kelas. Menurut Butts, pada praktiknya orientasi kaum ini lebih meniscayakan keberpihakan mereka dengan sayap 'efisiensi sosial' dalam aliran *progresifisme*. Secara sosial hal tersebut jelas-jelas menguntungkan mereka yang memiliki kepentingan bisnis pembangunan serta ambisi-ambisi kemajuan fisik fasilitas hidup. Maka dari itu sekitar antara tahun 1920-an sampai dekade-dekade selanjutnya orientasi pendidikan di Amerika Serikat cenderung memiliki persenyawaan kuat dengan orde kekuatan pembangunan negara berhaluan kapitalis.

Tampaknya sejarah yang berproses pada masyarakat Amerika Serikat tersebut menjumpai kondisi yang relevan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara ini secara jelas membutuhkan teknokrat-teknokrat untuk membangun sarana fisik, infrastruktur serta upaya kulturisasi masyarakat agar sesuai dengan atmosfer industrialisasi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Nugroho (2001) yang melihat perubahan tatanan kebijakan politik dari penguasa Orde Lama dengan Orde Baru. Transformasi slogan '*politik sebagai panglima*' pada zaman Orde Lama berubah menjadi '*pembangunan sebagai panglima*' pada zaman Orde Baru. Sebagai implikasinya inflasi dapat ditekan menjadi sekitar 10% dan tingkat pertumbuhan GNP mencapai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berkembang, yaitu 8-9% per tahun. Pendapatan perkapita yang mencapai US\$ 560 dalam waktu kurang dari lima belas tahun telah memindahkan Indonesia dari kelompok negara miskin ke kelompok negara berpenghasilan menengah.

Inilah letak perbedaan yang cukup menyolok antara masyarakat sederhana dengan masyarakat yang sudah kompleks. Dalam masyarakat kompleks hubungan fungsional antara pendidikan dan ekonomi cenderung rumit mengingat pertumbuhan pranata-pranata baru yang melayani kebutuhan masyarakat tidak bisa dihindari ekskalasinya. Hubungan antarlembaga dalam masyarakat yang kompleks bersifat fungsional, independen dan saling tergantung menuju konfigurasi yang mengarah pada format masyarakat baru.

Dahulu kala peranan pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat yang sederhana hanya cukup apabila sudah dapat mem-

bentuk penerusnya menguasai teknik penghidupan tradisional sehingga dengan begitu tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat sudah mampu terpenuhi. Namun hal itu berbeda jauh dengan kondisi baru yang melingkupi masyarakat kompleks. Sebagai bagian dari transisi modernisasi proses divergensi dan konvergensi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tidak bisa dipungkiri. Di sini pendidikan justru menempati urutan pertama dalam mengawal masyarakat menghadapi perubahan-perubahan baru. Bersamaan dengan hal tersebut berkembang pulalah konsep sosial ekonomi masyarakat kita seiring dengan lahirnya lembaga baru yang mengatur seluruh wahana kehidupan manusia. Keberadaan negara kita yang menjadi simbol kedaulatan bangsa harus memberikan konsekuensi-konsekuensi tersendiri kepada seluruh pranata yang bernaung di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Kini pendidikan memiliki beban sosial baru yang menempati berbagai segi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam konteks pembangunan di berbagai sektor baik itu masyarakat pedesaan, masyarakat pegunungan, perkotaan, masyarakat nelayan atau komunitas-komunitas lokal yang berbeda-beda baik dari segi adat istiadat, agama, ras atau keturunan, suku, budaya yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Pendidikan modern sebagai manifestasi kekuatan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan harus berhadapan dengan nilai-nilai lokal masyarakat kita. Sementara dalam waktu yang relatif cepat lembaga pendidikan modern juga harus mampu memenuhi target tingkat ekonomi nasional agar setaraf dengan negara-negara lain di dunia.

Selain harus dapat melanjutkan tradisi aktivitas ekonomi masyarakat kita di tiap wilayah kebudayaannya, maka dalam proses selanjutnya pendidikan modern kita juga harus mampu mengubah pandangan masyarakat kita agar sejalan dengan komitmen proyek besar negara berwujud industrialisasi di seluruh sektor. Inilah dua segi beban sosial yang cukup berat menjadi tanggung jawab aktivitas pendidikan bagi negara dengan realitas kemajemukan masyarakat tradisional yang tengah berupaya ingin mengejar ketertinggalan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

C. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Uraian di atas sudah cukup dijelaskan bahwa konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat. Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (*input*) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas.

Lalu pertanyaan, apa ukuran yang menentukan kualitas manusia? Ada berbagai aspek yang dapat menjelaskan hal ini seperti aspek kesehatan, pendidikan, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Ini adalah anggapan umum, yang secara teoretis akan diuraikan lebih detail.

Menurut Tobing (1997) dewasa ini berkembang paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial.

Teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini

mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz (dalam Tobing, 1997), juga pemenang hadiah Nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini.

Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi.

Pada tahun 70-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya nonformal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Lester Thurow, 1974, John Meyer, 1977 dan Randall Collins, 1979 (sebagaimana dituangkan oleh Tobing, 1997).

Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang bepen-

didikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemandirian dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Teori mana yang relevan dalam situasi sekarang? Seperti disebutkan di atas, pandangan baru dalam pertumbuhan produktivitas, yang dimulai pada akhir 1980-an dengan pionir seperti Paul Romer dan Robert Lucas, menekankan aspek pembangunan modal manusia.

Romer, 1991 (dalam Tobing, 1997) menyatakan bahwa, modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Oleh karena modal manusia, seperti dikemukakan di atas memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi.

Secara implisit, pendidikan menyumbang pada penggalian pengetahuan. Ini sebetulnya tidak hanya diperoleh dari pendidikan tetapi juga lewat penelitian dan pengembangan ide-ide, karena pada hakikatnya, pengetahuan yang sama sekali tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia akan mubazir. Aspek penelitian dan pengembangan menjadi salah satu agenda utama apabila bangsa Indonesia berkeinginan untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah jauh lebih maju. Dengan keterbatasan modal kapital dan manusia, tugas pengembangan penelitian ini tidak mungkin hanya diusahakan pemerintah. Seharusnya, pihak swasta menjadi ujung tombak dalam usaha kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Beberapa Tantangan Dunia Pendidikan di Indonesia Saat Ini

Kenyataan menunjukkan bahwa, meskipun kegiatan pendidikan telah berlangsung di Indonesia selama 56 tahun, namun

belum berhasil menyediakan SDM berkualitas. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, sektor pembangunan pendidikan tidak pernah ditempatkan menjadi prioritas pembangunan. Akibatnya mutu pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand.

Apabila keempat negara ini telah berhasil mengirim tenaga-tenaga kerja terampil dan profesional untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia di mancanegara, maka Indonesia baru dalam tingkat mengirim tenaga kerja untuk pekerjaan kasar seperti buruh pabrik, perkebunan, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Bangsa Indonesia dilanda krisis moneter lalu berlanjut sebagai krisis multidimensi sejak 1997 yang lalu dan hingga sekarang masih terpuruk akibat masa lalu yang mengabaikan pembangunan pendidikan. Sedangkan bangsa lain yang terkena krisis seperti Indonesia sudah bangkit kembali karena di masa lalu mereka menaruh perhatian besar terhadap sektor pembangunan pendidikan. Mereka bisa cepat bangkit karena memiliki kualitas SDM yang baik.

Adapun tantangan yang menghadang dunia pendidikan Indonesia saat ini meliputi:

1. Heterogenitas Tingkat Pendidikan Masyarakat

Heterogenitas tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dapat dilihat pada masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia. Masih banyak penduduk yang buta aksara terutama di pedesaan, di samping mayoritas sudah dapat membaca dan menulis bahkan banyak yang sarjana. Pada jenjang sekolah dasar, terutama di pedesaan banyak anak-anak usia sekolah yang tidak pernah mengikuti sekolah dasar, putus sekolah, di samping banyak yang tamat sekolah dasar. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Penyebab utamanya adalah masalah kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah: (1) kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan berbagai pelatihan keterampilan teknis bagi anak-anak (pemuda) sangat terbatas, (2) jumlah pemuda putus sekolah meningkat, bahkan banyak yang tidak pernah sekolah, (3) jumlah pemuda melek

huruf fungsional sangat rendah, dan (4) mutu SDM generasi muda sangat buruk.

Sehubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan pemuda di pedesaan, *United Nations* dalam Anshori (2000), mengemukakan beberapa permasalahan pokok yaitu, (1) pada usia muda mereka sudah menjadi tenaga kerja keluarga atau bekerja pada orang lain, (2) waktu musim tanam atau panen, mereka bekerja melebihi jam kerja normal, (3) umumnya mereka menganggur pada pasca panen, (4) untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka wajib kerja mencari upah, (5) mereka berkeluarga atau kawin pada usia muda, (6) mereka tidak ingin berbaur dengan teman sebaya yang melek huruf, meskipun usia mereka sama, (7) merasa takut terhadap situasi belajar mengajar yang sifatnya formal, (8) mereka meninggalkan desa untuk menghindari lapangan kerja pertanian, dan (9) mereka dihadapkan dengan lahan pertanian sempit yang mereka anggap akan membuat mereka tetap miskin.

2. Keterpurukan Perekonomian Masyarakat

Krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997, memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Jumlah masyarakat miskin dan yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat. Pengangguran terbuka sudah mencapai 40 juta orang pada tahun 2004. Ditambah lagi pengangguran terselubung. Akibat langsung terhadap pendidikan adalah jumlah anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan meningkat. Indikator sosialnya adalah meningkatnya anak jalanan dan keluarga jalanan di kota-kota besar. Pada Pendidikan Tinggi, banyak mahasiswa yang diharapkan menjadi calon intelektual muda, terpaksa cuti kuliah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi siswa SLTP dan SLTA yang putus sekolah, masalahnya akan lebih rumit, karena pada usia ini, emosi mereka belum stabil, tidak toleran terhadap orang lain, agresif secara fisik, rendah kesadaran akan kesalahan diri, dan menunjukkan perilaku yang egoistik.

Apabila keluarga dan pemerintah tidak tanggap terhadap permasalahan ini, maka cepat atau lambat pengaruh lingkungan yang tidak kondusif akan membuat mereka terlibat pada kenakalan remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku-perilaku kejahatan yang lebih ekstrim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan berhubungan erat

dengan pembangunan ekonomi, terutama pembangunan ekonomi yang berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik.

Mengenai kesalahan pembangunan ekonomi dan pengaruh negatifnya pada pendidikan, Tilaar (2000: 4-5) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang dijadikan panglima dengan hanya memprioritaskan target pertumbuhan telah melahirkan pembangunan ekonomi yang tanpa perasaan. Akibatnya terjadi kesenjangan antardaerah, antarsektor, dan antarmasyarakat. Struktur ekonomi yang tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik telah menyebabkan ekonomi yang rapuh dan ketergantungan industri pada bahan baku impor. Selanjutnya, kehidupan ekonomi semakin lama semakin tergantung pada utang luar negeri yang besar. Akibat kehidupan ekonomi yang demikian ialah lahirnya sistem pendidikan yang tidak peka untuk meningkatkan daya saing, yang tidak produktif karena tergantung pada bahan baku impor. Selanjutnya, pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial oleh karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya. Sejalan dengan itu lahirnya ekonomi biaya tinggi karena korupsi yang melahirkan penanganan ekonomi yang tidak profesional tetapi mengikuti jalan pintas. Dengan sendirinya *output* pendidikan tidak mempunyai daya saing apalagi mempunyai daya saing global.

Mengenai hubungan tingkat pendidikan dengan peningkatan ekonomi ini, Hungtington (1995) mengemukakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi yang lebih baik berpengaruh positif pada peningkatan jumlah publik yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan masyarakat kelas menengah yang lebih besar. Keadaan ini akan melahirkan sikap kultur warga negara yang lebih baik, bertanggung jawab, dan memiliki kepuasan dan kompetensi yang mendukung terwujudnya demokrasi.

Berkaitan dengan hubungan pendidikan dan perkembangan ekonomi ini, Edgar Faure pada makalahnya tentang "Pendidikan dan Hari Depan Umat Manusia" (Sindhunata, 2001: 4) menegaskan bahwa kecepatan perkembangan pendidikan dan pengajaran selalu selaras dengan kecepatan langkah perkembangan ekonomi. Apabila ekonomi berkembang cepat, maka pendidikan pun cenderung cepat mengembangkan pengetahuan guna menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada bidang pembangunan ekonomi.

3. Masalah Pemerataan Pendidikan

Indonesia terdiri dari 13.000 kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari keseluruhan pulaunya, baru kira-kira 6.000 pulau yang dihuni manusia. Penduduk Indonesia diperkirakan 200-an juta pada awal abad ke-21, dengan 560 kelompok etnis, yang mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri. Agama yang sudah diakui pemerintah ialah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Tampubolon, 2001: 1-3).

Konsep "pendidikan untuk semua" mempunyai makna bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban untuk membangun pendidikan nasional yang bermutu. Konsekuensinya diperlukan pemerataan pendidikan. Apa saja kendala yang dapat kita pelajari dari pemerataan pendidikan ini? Paling sedikit terdapat lima kendala internal yang menghambat pemerataan pendidikan yaitu (1) kendala geografis, artinya banyak pulau-pulau atau daerah-daerah yang sulit dijangkau pendidikan karena faktor komunikasi, (2) sarana pendidikan yang terbatas akibat alokasi dana yang sangat minim, (3) pemerintah masih mengutamakan pembangunan ekonomi sebagai prioritas, sementara pendidikan belum memperoleh porsi yang wajar, (4) tidak ada penghargaan yang wajar terhadap profesi guru, terutama yang menyangkut kesejahteraan, padahal kunci utama pendidikan bermutu ialah mutu guru itu sendiri, dan (5) perencanaan pendidikan yang sentralistik yang mengabaikan kemampuan dan karakteristik daerah.

E. Implikasi Realitas Pendidikan Indonesia terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Sektor Wiraswasta

Gugatan berkepanjangan terhadap pendidikan nasional berkisar pada kualitas para lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Lembaga pendidikan tidak bisa menghasilkan lulusan siap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan ekonomi nasional. Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini kemudian menjadi isu utama dalam polemik antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Jalan keluar yang sempit

mengemuka beberapa tahun lalu adalah konsep *link and match* (kaitan dan padanan) antara dunia pendidikan dan dunia usaha yang didengarkan mantan Mendikbud Wardiman.

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik ini dapat berdampak serius pada berbagai dimensi kehidupan. Dari dimensi politik (Huntington, 1995) mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan para penganggur, semakin gawat kadar tindakan destabilitas yang tercipta. Lulusan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong pada perubahan sosial yang cepat. Sementara itu tamatan pendidikan menengah yang tidak bekerja dapat semakin mempergawat kadar ketidakdamaian politik. Di Afrika Barat misalnya, banyak kerusuhan dan aksi-aksi politik yang eksplosif didukung oleh para lulusan dunia pendidikan menengah yang tidak bekerja.

Dari dimensi ekonomi, masalah ini merupakan pemborosan nasional. Investasi pendidikan adalah biaya yang tidak sedikit, apalagi pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Apabila angkatan kerja ini tidak didayagunakan sesuai dengan kapasitasnya, maka terjadi inefisiensi (pemborosan) biaya, waktu, dana maupun energi.

Dari dimensi sosial-psikologi, pengangguran tenaga terdidik sangat berbahaya. Situasi ini akan menimbulkan kemerosotan rasa percaya diri dan harga diri para penganggur. Apabila berlangsung dalam kurun waktu relatif lama, hilangnya rasa percaya diri ini akan semakin terakumulasi dan dapat mengimbas pada angkatan kerja lainnya. Oleh karena pengangguran terdidik berada pada kisaran usia muda, rasa minder ini akan berdampak serius mengingat pemuda adalah generasi penerus dan harapan bangsa di masa depan.

1. Beberapa Penyebab

Apabila ditelusuri lebih lanjut, meningkatnya pengangguran tenaga terdidik merupakan gabungan beberapa penyebab. Pertama, ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status atau masalah keahlian khusus.

Kedua, semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan besar daripada membuka usaha sendiri. Hal ini diperkuat hasil studi Clignet, 1980 (dalam Assegaf, 2001) yang menemukan gejala meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia antara lain disebabkan adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman dari resiko. Dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Ketiga, terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sektor formal yang kurang beresiko. Hal ini menimbulkan tekanan penawaran di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal.

Keempat, belum efisiennya fungsi pasar tenaga kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja.

2. Proses Pergeseran

Pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah membawa perubahan pada struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana dikutip oleh Assegaf (2001) Oberai, 1978, menyatakan bahwa, angkatan kerja cenderung bergeser ke arah sektor dan pekerjaan yang mempunyai tingkat upah yang tinggi seperti manufaktur berskala besar, jasa modern, transportasi dan konstruksi. Juga dikemukakan bahwa perolehan gaji pada setiap lapangan kerja meningkat bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan paralel dengan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung menuntut syarat-syarat pendidikan dan keterampilan tinggi.

Selama perkembangan jaman peran angkatan kerja kategori profesional, manajerial, dan teknis akan meningkat karena perubahan sektoral lapangan kerja dari sektor primer ke sektor

sekunder dan tersier. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, persediaan tenaga kerja berpendidikan SLTA ke atas akan meningkat, namun pada akhirnya, tenaga kerja ini akan diserap oleh jenis-jenis pekerjaan lain, seperti pemasaran, kerajinan dan peternakan.

Seiring dengan pertumbuhan industri manufaktur dan jasa kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan menengah tentu akan meningkat. Dengan demikian, dalam jangka panjang persediaan tenaga kerja berpendidikan menengah ini merupakan keunggulan komparatif Indonesia. Melihat pada kasus Jepang, selain faktor sumber daya alam, banyak industri Jepang relokasi ke luar negeri karena kurangnya (juga mahal) tenaga kerja berpendidikan menengah untuk mendukung industri manufaktur. Demikian juga Taiwan dan Korea Selatan yang mulai mengalami hal sama dengan Jepang.

Keunggulan komparatif ini tidak berarti terletak pada upah yang rendah. Justru masalahnya, bagaimana meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah ke atas sehingga elastisitas penawarannya tinggi. Hal ini berarti perlu penekanan perhatian terhadap kurikulum sistem pendidikan formal menyangkut, sejauh mana isi kurikulum mampu meningkatkan keterampilan, keahlian dan daya adaptasi lulusan terhadap dunia kerja. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika kurikulum secara eksplisit meliputi beberapa langkah "bimbingan karir" atau informasi realistis tentang prospek pasar tenaga kerja, latihan manajerial dasar atau wirausaha dan praktik permagangan.

3. Beberapa Alternatif di Masa Mendatang

Krisis ekonomi yang berkelanjutan, yang terutama dipersulit dengan tarik menarik kepentingan berbagai kelompok politik, telah menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi pada angkatan kerja terdidik. Sementara itu, persoalan mendasar yang sudah berkembang sebelum krisis, yaitu adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dan dunia kerja belum juga terjawab. Di lain situasi, akselerasi perubahan di bidang manajemen, bisnis dan teknologi sangat cepat dewasa ini. Ini mensyaratkan bahwa dunia pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih berat. Selain kualitas *output* dalam hubungan dunia usaha dan dunia pendidikan ini, dunia pendidikan nasional juga dituntut untuk

mampu mengadaptasi pada perubahan sosial yang terjadi. Ini terutama berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah. Orientasi pendidikan di masa Orde Baru tentu berbeda dengan orientasi pendidikan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Hal ini yang belum jelas tercermin dari kementerian pendidikan, yakni kebijakan apa yang harus dilakukan dalam upaya mengadaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi serta untuk turut memajukan kesejahteraan dan kesatuan nasional.

Salah satu hal yang mendesak adalah pengenalan dan pengimplementasian kewiraswastaan dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari menengah pertama sampai pendidikan tinggi. Ini dengan sendirinya akan mendorong para lulusan sekolah menengah atas untuk tidak bersikap pasif dan putus asa apabila hanya mampu sekolah di tingkat lanjutan atas. Akan tetapi mereka akan menjadi terangsang dengan berbagai alternatif yang mungkin seperti berusaha dengan pemahaman tentang dunia usaha yang sudah terbentuk sejak di bangku sekolah. Implementasi kewiraswastaan ini tidak hanya proses belajar di kelas, tetapi lebih pada perangsangan dan penggalian ide, pengenalan dunia usaha dan pengetahuan tentang berusaha. Ini kemudian melibatkan dunia usaha di mana baik secara fungsional dan institusi, dunia usaha dapat membantu pengimplementasian program tersebut.

Dalam kewiraswastaan ter-*internalize* semangat kerja sama, kerja keras dan penghargaan akan waktu. Dengan demikian pengimplementasian kewiraswastaan terhadap pendidikan nasional baik menengah dan tinggi dengan secara serius dan melibatkan dunia usaha secara sungguh-sungguh akan mendorong lahirnya generasi penerus yang berwatak kerja keras, memiliki toleransi dan mandiri. Pengembangan kewiraswastaan dengan sungguh-sungguh akan berdampak ganda, yakni dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah *mismatch* dan juga mempersiapkan dan membangun mentalitas dan watak generasi penerus sehingga mampu menjawab tantangan masanya.

F. SDM Indonesia dalam Persaingan Global

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan

SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.

Dalam kaitan tersebut, setidaknya ada dua hal penting (Assegaf, 2001: 16) menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu, Pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja.

Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Akan tetapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki (*resources base*) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.

Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha.

Menurut Arifin (2002) perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Produksi, di mana perusahaan memproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
2. Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (*build-operate-transfer*) bersama mitrausaha dari mancanegara.
3. Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka mobilitas manusia akan semakin mudah dan bebas.
4. Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dan lain-lain melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
5. Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam

perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.

Globalisasi mengarah pada kondisi meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional, pergerakan tenaga kerja dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis korporasi di Indonesia. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan basis usaha, efisiensi biaya dan keunggulan kompetitif.

Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis korporasi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Bagaimanapun pembangunan

ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Dalam pandangan Wahyudi (2001) salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolok ukur kualitatif atau mutu pendidikan.

Problem utama dalam pembangunan sumber daya manusia adalah terjadinya salah penempatan sumber daya manusia. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.

Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang diciptakan pemerintah.

Seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai tuntutan yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan

hanya mengandalkan sumber daya alam yang tak terolah dan menjadi buruh yang murah. Dengan demikian yang terjadi bukanlah terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan *link and match* mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide *link and match* yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana.

Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Oleh karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.